

**PENTINGNYA PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI MATERI  
PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI  
(STUDI KASUS DI SEKOLAH TINGGI TEKNIK MALANG)**

**Dra. Tri Endang Sungkowo Putri**

**ABSTRAK**

Pancasila merupakan warisan luar biasa dari pendiri bangsa yang mengacu kepada nilai-nilai luhur. Hampir tidak ada keraguan lagi, mayoritas bangsa Indonesia ini berpendapat bahwa Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup masyarakat Indonesia yang plural tidak tergantikan. Pancasila yang akomodatif terhadap agama tidak dapat tergantikan oleh ideologi sekulerisme yang tidak selalu bersahabat dengan agama. Oleh karena itu, pemulihan kembali kesadaran kolektif bangsa tentang posisi vital dan urgensi Pancasila dalam kehidupan negara bangsa Indonesia. Pancasila kembali menjadi rujukan dan panduan dalam pengambilan berbagai kebijakan dan langkah, mulai dalam kehidupan keagamaan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan keadilan.

Mata kuliah pendidikan Pancasila yang mencakup unsur filsafat Pancasila, merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MKPK) pada susunan kurikulum inti perguruan tinggi di Indonesia. Mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib untuk diambil oleh setiap mahasiswa pada perguruan tinggi untuk program diploma/politeknik dan program sarjana. Pendidikan Pancasila dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang Pancasila sebagai filsafat/tata nilai bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional dengan segala implikasinya.

Kata Kunci : Pancasila, urgensi Pancasila, mata kuliah pendidikan Pancasila.

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perubahan yang terjadi di dunia terasa begitu cepat, sehingga menyebabkan seluruh tatanan yang ada di dunia ini ikut berubah, sementara tatanan yang baru belum terbentuk. Hal ini menyebabkan sendi-sendi kehidupan yang selama ini diyakini kebenarannya menjadi usang. Nilai-nilai yang menjadi panutan hidup telah kehilangan otoritasnya, sehingga manusia menjadi bingung. Kebingungan itu menimbulkan

berbagai krisis, terutama ketika terjadi krisis moneter yang dampaknya terasa sekali di bidang politik, sekaligus juga berpengaruh di bidang moral serta sikap perilaku manusia di berbagai belahan dunia, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Guna merespons kondisi tersebut di atas, pemerintah perlu mengantisipasi agar tidak menuju ke arah keadaan yang lebih memprihatinkan. Salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam menjaga nilai-nilai panutan hidup dalam berbangsa dan

bernegara secara lebih efektif yaitu melalui bidang pendidikan.

Upaya di bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi berupa perubahan-perubahan di bidang kurikulum. Kurikulum pengajaran di perguruan tinggi harus mampu menjawab problem transformasi nilai-nilai tersebut. Sesuai dengan acuan strategi pembangunan pendidikan nasional (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas), maka ditetapkan bahwa:

1. Kurikulum perguruan tinggi perlu dirancang berbasis kompetensi yang sejalan dan searah dengan desain kurikulum bidang studi di perguruan tinggi,
2. Proses pembelajaran berpendekatan kepentingan mahasiswa yang bersifat mendidik dan dialogis,
3. Profesionalisme dosen selaku pendidik perlu terus-menerus ditingkatkan.

Dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara di era reformasi, belum terlihat jelas upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila secara sungguh-sungguh. Segala kegagalan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan, disebabkan tidak adanya kesungguhan mewujudkan pembangunan yang mengacu pada nilai-nilai visioner Pancasila. Sadar, atau tidak sadar

Pancasila mempunyai fungsi integratif yang menjamin kesatuan negara bangsa Indonesia yang pluralistik. Tidaklah berlebihan jika Pancasila menjadi salah satu kekaguman dunia luar terhadap Indonesia, karena memiliki fungsi menyatukan masyarakat dan wilayah nusantara yang begitu luas, dengan berbagai latar belakang suku, budaya, bahasa, dan agama.

Reformasi telah berjalan semenjak tahun 2000, semula harapan Indonesia maju secara positif, namun kenyataannya malah sebaliknya, banyak ditemukan kecenderungan perubahan yang negatif dalam berbagai bidang, seperti: politik, ekonomi, dan hukum. Dalam bidang ekonomi, Indonesia lebih mengarah pada sistem liberal, pasar modern bermodal besar bermunculan menggusur ekonomi rakyat. Dalam bidang hukum, penegakan hukum belum maksimal. Semua terjadi karena Indonesia terpengaruh dengan peradaban Barat yang cenderung individualis, liberal, materialis dan hedonis. Oleh karena itu, perubahan yang kita inginkan adalah berdasarkan kepada karakter bangsa yang telah teruji kebenarannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila merupakan warisan luar biasa dari pendiri bangsa yang mengacu kepada nilai-nilai luhur. Hampir tidak ada

keraguan lagi, mayoritas bangsa Indonesia ini berpendapat bahwa Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup masyarakat Indonesia yang plural tidak tergantikan. Pancasila yang akomodatif terhadap agama tidak dapat tergantikan oleh ideologi sekulerisme yang tidak selalu bersahabat dengan agama. Oleh karena itu, pemulihan kembali kesadaran kolektif bangsa tentang posisi vital dan urgensi Pancasila dalam kehidupan negara bangsa Indonesia. Pancasila kembali menjadi rujukan dan panduan dalam pengambilan berbagai kebijakan dan langkah, mulai dalam kehidupan keagamaan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan keadilan.

### **1.2. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui pentingnya pendidikan Pancasila sebagai materi pembelajaran di Perguruan Tinggi.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan mahasiswa sebagai subyek pembelajaran terhadap Pendidikan Pancasila.
3. Untuk mengetahui metode yang tepat dalam menyampaikan materi pembelajaran Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi.

### **1.3. MANFAAT PENELITIAN**

1. Dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami masuknya Pendidikan Pancasila dalam kurikulum Perguruan Tinggi.
2. Membantu mempermudah penerapan Pendidikan Pancasila dalam proses belajar dan mengajar di Perguruan Tinggi.

## **2. PERMASALAHAN**

Pendidikan abad 21 yang disepakati oleh 9 menteri pendidikan dari negara berpenduduk terbesar di dunia, termasuk Indonesia di New Delhi 1996, diharapkan dapat berperan secara efektif dalam hal :

1. Mempersiapkan pribadi, sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab;
2. Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup; dan
3. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kepentingan kemanusiaan.

Senada dengan hal di atas, Konferensi Dunia tentang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh

UNESCO di Paris pada tahun 1998, yang dihadiri oleh wakil-wakil dan 140 negara termasuk Indonesia, menyepakati perubahan pendidikan tinggi ke masa depan yang bertumpu pada pandangan, bahwa tanggung jawab pendidikan tinggi adalah:

1. Selain meneruskan nilai-nilai, transfer ilmu pengetahuan teknologi dan seni, juga melahirkan arga negara yang berkesadaran tinggi tentang bangsa dan kemanusiaan;
2. Mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang dinamis; dan
3. Mengubah cara berpikir, sikap hidup dan perilaku berkarya individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka memprakarsai perubahan sosial yang berkaitan dengan perubahan ke arah kemajuan, adil dan bebas.

Sejalan dengan kesepakatan dunia yang telah disebutkan di atas, pendidikan nasional Indonesia melakukan penyesuaian yang dituangkan dalam Ketetapan MPR No. VII Tahun 2001, bahwa visi Indonesia 2020 adalah bertujuan terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

Menurut Malik Fajar (1999), masyarakat Indonesia yang memmanifestasikan wujud visi Indonesia 2020 disebut juga sebagai “*masyarakat madani*”, yaitu suatu masyarakat yang memiliki “keadaban demokratis” atau masyarakat yang berkarakter sebagai berikut:

1. Beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Pancasila.
2. Demokratik, berkeadaban, menghargai perbedaan, keragaman, pendapat, dan pandangan.
3. Mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan, dan tidak diskriminatif.
4. Sadar serta tunduk pada hukum dan ketertiban.
5. Mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik, memiliki keahlian, keterampilan kompetitif dengan solidaritas universal.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang mengakar pada masyarakat beradab dan demokratis.
7. Belajar yang berlangsung sepanjang hayat, membangun warga negara berkeadaban.

UU No. 20 Tahun 2003 memberikan rumusan tentang Visi Indonesia 2020 berupa masyarakat warga yang berkeadaban (*civil society*/

masyarakat madani) yang hendak diwujudkan melalui pendidikan nasional sebagai berikut :

Untuk mencapai visi Indonesia 2020, pendidikan tinggi nasional Indonesia memiliki program jangka menengah yang disebut “Visi Pendidikan Tinggi Nasional 2010”, sebagai berikut:

1. Mengembangkan kemampuan intelektual mahasiswa untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab bagi kemampuan bersaing bangsa mencapai kehidupan yang bermakna.
2. Membangun suatu sistem pendidikan tinggi yang berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang demokratis, berkeadaban dan inklusif, serta menjaga kesatuan dan persatuan nasional.

Dengan dasar itu semua, maka perguruan tinggi harus mampu menghasilkan manusia yang unggul secara intelektual, anggun secara moral, kompeten dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta memiliki komitmen tinggi untuk berbagai kegiatan pemenuhan amanat sosial. Pancasila harus menjadi core philosophy bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis, dalam rangka mewujudkan masyarakat warga

yang berkeadaban. Berdasarkan itu semua, perguruan tinggi umum harus mampu menghasilkan manusia yang unggul secara intelektual, anggun secara moral, kompeten dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta memiliki komitmen tinggi untuk berbagai kegiatan pemenuhan amanat sosial tersebut.

### **3. LANDASAN TEORI**

#### **3.1. LANDASAN YURIDIS PENDIDIKAN PANCASILA**

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menetapkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menetapkan lulusan program magister untuk mengajar program diploma dan sarjana. Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi, wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia serta bahasa Inggris. Sedangkan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program diploma dan sarjana, wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan serta

mata kuliah statistika dan atau matematika.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka Dirjen Dikti memutuskan dengan SK No. 43/DKTI/Kep./2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Keperibadian di Perguruan Tinggi, melalui pendidikan kewarganegaraan. Dalam perjalanannya silabus Pendidikan Pancasila tersebut dirasakan kurang mendapat tempat dalam perkuliahan melalui pendidikan kewarganegaraan di berbagai perguruan tinggi, sehingga menimbulkan banyak kritik dan kalangan akademisi.

Secara normatif pendidikan Pancasila memperoleh dasar legalitasnya dalam Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan:

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikti No. 2393/D/T/2009 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, menunjukkan telah diadakan beberapa kali simposium. diantaranya berikut ini:

1. Hasil Simposium Nasional III Pendidikan Pengembangan Keperibadian Tahun 2006 di Semarang.
2. Hasil Simposium Nasional IV Pendidikan Pengembangan

Keperibadian Tahun 2009 di Semarang.

3. Hasil Simposium Nasional Pendidikan Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan Kebangsaan Tahun 2009 di UPI Bandung.
4. Hasil Kongres Pancasila Tahun 2009 di UGM Yogyakarta.
5. Hasil Tim Pengkajian Penerapan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi 2009.

Ketentuan diatas harus dipahami sebagai pendidikan yang akan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak bangsa, yang didasarkan pada nilai-nilai luhur yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional menurut Pasal 3 Undang-Undang tentang Sisdiknas yang berbunyi : “... berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

## **3.2. LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA**

### **3.2.1. LANDASAN HISTORIS**

Suatu bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidupnya sendiri yang

diambil dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa itu sendiri. Pancasila digali dari bangsa Indonesia sendiri yang telah tumbuh dan berkembang semenjak lahirnya bangsa Indonesia. Masa yang dapat dipersamakan dengan lahirnya bangsa Indonesia yang memiliki wilayah seperti Indonesia merdeka saat ini, adalah masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Pada masa itu, nilai-nilai ketuhanan, seperti kepercayaan kepada Tuhan telah berkembang dan sikap toleransi juga telah lahir, begitu pula nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila-sila yang lainnya.

Setelah melalui proses sejarah yang cukup panjang, nilai-nilai Pancasila itu telah melalui pematangan, sehingga tokoh-tokoh bangsa Indonesia saat akan mendirikan negara Republik Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, telah terjadi perubahan dan pergantian undang-undang dasar, seperti UUD 1945 digantikan kedudukannya oleh Konstitusi RIS, kemudian berubah menjadi UUD Sementara dan kembali lagi menjadi UUD 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, tetap tercantum nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan, bahwa Pancasila telah disepakati sebagai nilai yang dianggap paling tinggi kebenarannya. Oleh karena

itu, secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai Pancasila.

### **3.2.2. LANDASAN KULTURALIS**

Pandangan hidup bagi suatu bangsa adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bangsa itu sendiri. Bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup, adalah bangsa yang tidak memiliki kepribadian dan jati diri, sehingga bangsa itu mudah terombang-ambing dari pengaruh yang berkembang dari luar negerinya. Kepribadian yang lahir dari dalam dirinya sendiri akan lebih mudah menyaring masuknya nilai-nilai yang datang dan luar, sehingga dapat memperkuat nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri bangsa itu sendiri. Sebaliknya, apabila bangsa itu menerima kepribadian dari bangsa luar, tentu akan mudah terpengaruh dari nilai-nilai yang belum teruji kebenarannya sehingga dapat menghilangkan jati diri dari bangsa itu sendiri.

Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila bukanlah pemikiran satu orang, seperti halnya ideologi komunis yang merupakan pemikiran dan Karl Marx, melainkan pemikiran konseptual

dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia, seperti Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Prof. Mr. Dr. Supomo, dan tokoh-tokoh lain-lain. Sebagai hasil pemikiran dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang digali dari budaya bangsa sendiri, Pancasila tidak mengandung nilai-nilai yang kaku dan tertutup. Pancasila mengandung nilai-nilai yang terbuka terhadap masuknya nilai-nilai baru yang positif, baik yang datang dari dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar negeri. Dengan demikian, generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman.

### **3.2.3. LANDASAN YURIDIS**

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pasal 39 ayat (2) menyebutkan, bahwa isi kurikulum setiap jenis, alur, dan jenjang pendidikan wajib memuat: (a) pendidikan Pancasila, (b) pendidikan Agama, dan (c) pendidikan Kewarganegaraan. Di dalam operasionalnya, ketiga mata kuliah wajib dan kurikulum tersebut, dijadikan bagian dan kurikulum yang berlaku secara nasional.

Sebelum dikeluarkan PP No. 60 Tahun 1999, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.30

Tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Silabus pendidikan Pancasila semenjak tahun 1983 sampai tahun 1999, telah banyak mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat, bangsa, dan negara yang berlangsung cepat, serta kebutuhan untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat disertai dengan pola kehidupan mengglobal. Perubahan dari silabus pendidikan Pancasila adalah dengan keluarnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 265/Dikti/Kep/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila pada Perguruan Tinggi di Indonesia. Dalam keputusan ini dinyatakan, bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila yang mencakup unsur filsafat Pancasila, merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MKPK) pada susunan kurikulum inti perguruan tinggi di Indonesia. Mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib untuk diambil oleh setiap mahasiswa pada perguruan tinggi untuk



program diploma/politeknik dan program sarjana. Pendidikan Pancasila dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang Pancasila sebagai filsafat/tata nilai bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional dengan segala implikasinya.

#### **3.2.4. LANDASAN FILOSOFIS**

Secara filosofis dan objektif, nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara Republik Indonesia. Sebelum berdirinya negara Indonesia, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan bangsa yang selalu berusaha mempertahankan persatuan bagi seluruh rakyat untuk mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban moral untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa memasuki globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap memiliki nilai-nilai, yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan

kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.

### **3.3.TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA**

#### **3.3.1.TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL**

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Berdasarkan UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menurut Pasal 4 dinyatakan tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu “Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani, dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak

mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan pasal ini, maka pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sangatlah penting keberadaannya.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, sebagai pengamalan Pancasila di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengusahakan: pertama, pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri; kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

### **3.3.2. MISI DAN VISI PENDIDIKAN PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN**

Pendidikan Pancasila sebagai salah satu dari mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), memiliki misi dan visi yang sama dengan mata kuliah MPK lainnya, yaitu sebagai berikut.

- a. Misi pendidikan Pancasila  
Misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman bagi

penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya.

- b. Visi pendidikan Pancasila  
Bertujuan membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan.

### **3.3.3. KOMPETENSI PENDIDIKAN PANCASILA**

Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mencakup unsur filsafat Pancasila, dengan kompetensinya bertujuan menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya.
- b. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan, serta cara-cara pemecahannya.
- c. Mengantarkan mahasiswa mampu mengenali perubahan-perubahan

dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

- d. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Pendidikan Pancasila yang berhasil akan membuahkan sikap mental bersifat cerdas, penuh tanggung jawab dan peserta didik dengan perilaku yang:

- a. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
- b. Berperikemanusiaan yang adil dan beradab,
- c. Mendukung persatuan bangsa,
- d. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan, dan
- e. Mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial.

### **3.3.4. DASAR SUBSTANSI KAJIAN PENDIDIKAN PANCASILA**

Berdasarkan pertimbangan latar belakang dan landasan-landasan pendidikan Pancasila sebagaimana diuraikan di atas, maka substansi kajian pendidikan Pancasila meliputi pokok-pokok bahasan sebagai berikut.

- a. Pancasila sebagai filsafat.
- b. Pancasila sebagai etika politik.

- c. Pancasila sebagai ideologi nasional.

- d. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
- e. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI.
- f. Pancasila sebagai paradigma kehidupan.
- g. Pancasila sebagai identitas dan karakter bangsa.
- h. Pancasila dalam sistem politik dan demokrasi Indonesia.
- i. Pancasila dalam konteks HAM, rule of law, dan hak kewajiban WNI.
- j. Pancasila dalam konteks negara kesatuan RI.

### **3.3.5. METODOLOGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA**

Agar pendidikan Pancasila lebih memberikan kesan dan mencapai sasaran, sesuai dengan misi dan visi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, maka proses pembelajarannya harus sesuai dengan konteks kemahasiswaan yang bercirikan kritis, analitis, dan dinamis. Dengan demikian, metodologi pembelajaran harus meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Pendekatan : menempatkan mahasiswa sebagai subjek pendidikan, mitra dalam proses

pembelajaran dan sebagai umat, anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara.

- b. Metode proses pembelajaran: pembahasan secara kritis analitis, induktif, deduktif, dan reflektif melalui dialog kreatif yang bersifat partisipatoris untuk meyakini kebenaran substansi dasar kajian.
- c. Bentuk aktivitas proses pembelajaran: kuliah tatap muka, ceramah, dialog (diskusi) interaktif, studi kasus, penugasan mandiri, seminar kecil, dan evaluasi belajar.
- d. Motivasi : menumbuhkan kesadaran bahwa proses belajar mengembangkan kepribadian merupakan kebutuhan hidup.

### **3.4. PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA**

#### **3.4.1. PENGERTIAN ETIKA**

Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas masalah baik dan buruk. Ranah pembahasannya meliputi kajian praksis dan refleksi filsafati atas moralitas secara normatif. Kajian praksis menyentuh moralitas sebagai perbuatan sadar yang dilakukan dan didasarkan pada norma-norma masyarakat yang

mengatur perbuatan baik (susila) atau buruk (asusila). Sedangkan refleksi filsafat tentang ajaran moral filsafat, mengajarkan bagaimana moral tersebut dapat dijawab secara rasional dan bertanggung jawab.

#### **3.4.2. PANCASILA SEBAGAI SUMBER ETIKA**

Aktualisasi Pancasila sebagai dasar etika, tercermin dalam sila-silanya, yaitu sebagai berikut:

- Sila Pertama: menghormati setiap orang atau warga negara atas berbagai kebebasannya dalam menganut agama dan kepercayaannya masing-masing, serta menjadikan ajaran-ajarannya sebagai panutan untuk menuntun maupun mengarahkan jalan hidupnya.
- Sila Kedua: menghormati setiap orang dan warga negara sebagai pribadi (persona) "*utuh sebagai manusia*", manusia sebagai subjek pendukung, penyangga, pengemban serta pengelola hak-hak dasar kodrati, merupakan suatu keutuhan dengan eksistensi dirinya secara bermartabat.
- Sila Ketiga: bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi segmentasi-segmentasi atau primordialisme sempit dengan jiwa dan semangat

“Bhineka Tunggal Ika”, yaitu bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan.

- Sila Keempat : kebebasan, kemerdekaan, kebersamaan, dimiliki dan dikembangkan dengan dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan secara jujur dan terbuka dalam menata berbagai aspek kehidupan.
- Sila Kelima: membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mencakup kesamaan derajat (*equality*) dan pemerataan (*equity*) bagi setiap orang atau setiap warga negara.

Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan integral dan integratif menjadikan dirinya sebagai referensi kritik sosial kritis, komprehensif serta sekaligus valuatif bagi pengembangan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Konsekuensi dan implikasinya ialah bahwa norma etis yang mencerminkan satu sila akan mendasari dan mengarahkan sila-sila lain.

### **3.4.3. PEMBERDAYAAN ETIKA PANCASILA DALAM KONTEKS KEHIDUPAN AKADEMIK**

Pancasila sebagai dasar etika dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara diberdayakan melalui kebebasan akademik untuk mendasari suatu sikap mental atau *attitude*. Kebebasan akademik adalah hak dan tanggung jawab seorang akademisi. Hak dan tanggung jawab itu terikat pada susila akademik, yaitu sebagai berikut.

- a. *Curiositti*, dalam arti terus menerus mempunyai keinginan untuk mengetahui hal-hal baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tidak mengenal titik henti yang dampak dan pengaruhnya dengan sendirinya juga terhadap pengembangan etika.
- b. Wawasan luas dan mendalam dalam arti bahwa nilai-nilai etika sebagai norma dasar bagi kehidupan suatu bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak terlepas dari unsur-unsur budaya yang hidup dan berkembang dengan ciri-ciri khas yang membedakan bangsa itu dan bangsa lain.
- c. Terbuka, dalam arti luas bahwa kebenaran ilmiah adalah sesuatu yang tentative, bahwa kebenaran ilmiah bukanlah sesuatu yang hanya sekali ditentukan dan bukan sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat, yang implikasinya ialah bahwa pemahaman suatu norma etika tidak hanya tekstual

melainkan juga kontekstual untuk diberi makna baru sesuai dengan kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.

- d. *Open mindedness*, dalam arti rela dan dengan rendah hati (modest) bersedia menerima kritik dan pihak lain terhadap pendirian atau sikap intelektualnya.
- e. Jujur, dalam arti menyebutkan setiap sumber atau informasi yang diperoleh dan pihak lain dalam mendukung sikap atau pendapatnya.

- f. *Independen*, dalam arti bertanggung jawab atas sikap dan pendapatnya, bebas dan tekanan atau “kehendak yang dipesankan” oleh siapapun dan dari manapun.

Pancasila sebagai *core philosophy* bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, juga memahami etika yang sarat dengan nilai-nilai filsafati, jika tidak dilandasi dengan pemahaman segi-segi filsafatnya, maka yang kita tangkap hanyalah segi-segi fenomenalnya saja tanpa menyentuh inti hakikinya.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. TEKNIK ANALISA

Dari 250 responden yang dilakukan secara acak, diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
1.	Tidak penting	35	14 %
2.	Kurang penting	27	10,8 %
3.	Sangat penting	188	75,2 %
Jumlah		250	100 %

Dari data diatas, pendapat mahasiswa tentang penting tidaknya mata kuliah Pancasila, yang berpendapat tidak penting sebanyak 14 %, kurang penting 10,8 %, sangat penting 75,2 %.

1. Pendapat mahasiswa tentang penting tidaknya mata kuliah Pancasila

2. Alasan tentang pentingnya mata kuliah Pancasila

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
1.	Karena merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa	176	70,4 %
2.	Agar bisa memahami dan mengamalkan Pancasila	40	16 %
3.	Agar mahasiswa dapat berperilaku sesuai Pancasila	34	13,6 %
Jumlah		250	100 %

Dari data diatas, alasan tentang pentingnya mata kuliah Pancasila karena merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa sebanyak 70,4 %, agar bisa memahami dan mengamalkan Pancasila

16 %, agar mahasiswa dapat berperilaku sesuai Pancasila 13,6 %.

3. Pendapat mahasiswa tentang kapan mata kuliah Pancasila sebaiknya diajarkan

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
1.	Semester awal masuk sebagai mahasiswa	104	41,6 %
2.	Pertengahan semester	37	14,8 %
3.	Akhir semester menjelang lulus	99	39,6 %
Jumlah		250	100 %

Dari data diatas, pendapat mahasiswa tentang mata kuliah Pancasila sebaiknya diajarkan pada semester awal masuk sebagai mahasiswa sebanyak 41,6 %, pertengahan semester sebanyak 14,8

%, akhir semester menjelang lulus sebanyak 39,6 %.

4. Pengamatan mahasiswa tentang kesetiakawanan mahasiswa saat ini

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
1.	Tidak ada kesetiakawanan	83	33,2 %
2.	Kurang kesetiakawanan	145	58 %
3.	Sangat setia kawan	22	8,8 %
Jumlah		250	100 %

Dari data diatas, pengamatan mahasiswa tentang kesetiakawanan mahasiswa saat ini, yang mengamati saat ini tidak ada kesetiakawanan diantara mahasiswa sebanyak 33,2 %, kurang

kesetiakawanan 58%, sangat setia kawan 8,8%.

5. Pengamatan tentang pergaulan mahasiswa saat ini

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
1.	Menyatu dengan sesama suku	164	65,6 %
2.	Menyatu dengan suku tertentu	25	10 %
3.	Menyatu dengan semua suku	61	24,4 %
Jumlah		250	100 %

Dari data diatas, pengamatan tentang pergaulan mahasiswa saat ini, menyatu dengan sesama suku sebanyak 65,6%, menyatu dengan suku tertentu 10%, menyatu dengan semua suku 24,4%.

6. Pendapat mahasiswa tentang ada tidaknya benturan diantara mahasiswa yang berbeda suku

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
1.	Ada	158	63,2 %
2.	Kadang-kadang	63	25,2 %
3.	Tidak ada	29	11,6 %
Jumlah		250	100 %

Dari data diatas, pendapat mahasiswa tentang ada tidaknya benturan diantara mahasiswa yang berbeda suku, yang berpendapat ada sebanyak 63,2%, kadang-kadang 25,2%, tidak ada 11,6%.

7. Pendapat tentang perbandingan antara mata kuliah Pancasila dengan mata kuliah yang lain

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
1.	Dibawah derajat mata kuliah lain	41	16,4 %
2.	Sederajat dengan mata kuliah lain	46	18,4 %
3.	Diatas derajat mata kuliah lain	163	65,2 %
Jumlah		250	100 %

Dari data diatas, pendapat tentang perbandingan antara mata kuliah Pancasila dengan mata kuliah yang lain, yang berpendapat dibawah derajat mata kuliah lain sebanyak 16,4%, sederajat dengan mata kuliah lain 18,4%, diatas derajat mata kuliah lain 65,2%.

8. Pengamatan mahasiswa tentang ada tidaknya penurunan nasionalisme diantara mahasiswa



No.	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
1.	Ada	189	75,6 %
2.	Tidak ada	61	24,4 %
Jumlah		250	100 %

Dari data diatas, pengamatan mahasiswa tentang ada tidaknya penurunan nasionalisme diantara mahasiswa, yang mengamati ada penurunan nasionalisme diantara mahasiswa sebanyak 75,6%, yang mengamati tidak ada penurunan 24,4%.

9. Pendapat mahasiswa tentang metode perkuliahan mata kuliah Pancasila

9. Pendapat mahasiswa tentang metode perkuliahan mata kuliah Pancasila

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
1.	Ceramah	49	19,6 %
2.	Tanya jawab	46	18,4 %
3.	Paduan keduanya	155	62 %
Jumlah		250	100 %

Dari data diatas, pendapat mahasiswa tentang metode perkuliahan mata kuliah Pancasila, dengan menggunakan ceramah sebanyak 19,6%, tanya jawab 18,4%, paduan keduanya 62%.

10. Pengamatan mahasiswa tentang ada tidaknya penurunan wawasan mahasiswa terhadap Pancasila.

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
1.	Ada	174	69,6 %
2.	Tidak ada	76	30,4 %
Jumlah		250	100 %

Dari data diatas, pengamatan mahasiswa tentang ada tidaknya penurunan wawasan mahasiswa terhadap Pancasila, yang mengamati ada sebanyak 69,6%, tidak ada 30,4%.

Pancasila, yang mengamati ada sebanyak 69,6%, tidak ada 30,4%.

## **4.2.HASIL PENELITIAN**

1. Pendidikan Pancasila sangat penting diajarkan di Perguruan Tinggi karena merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
2. Pendidikan Pancasila selayaknya diajarkan pada semester awal masuk sebagai mahasiswa agar setelah jadi mahasiswa dapat berperilaku sesuai ajaran Pancasila, atau diajarkan pada semester akhir menjelang lulus agar dapat mengamalkan dalam kehidupan.
3. Metode pembelajaran Pendidikan Pancasila sebaiknya menggunakan metode perpaduan antara ceramah dan tanya jawab.
4. Menurut pandangan mahasiswa saat ini dirasakan kurang adanya kesetiakawanan diantara mereka dalam bergaul. Ada kecenderungan bahwa pergaulan mereka sesuai kelompok masing-masing. Kesamaan ras masih dominan dalam menentukan pilihan bergaul.
5. Masih sering adanya benturan diantara para mahasiswa karena adanya perbedaan latar belakang budaya dan asal sukunya.
6. Menurut pandangan mereka, diantara para mahasiswa dirasakan adanya penurunan nasionalisme

yang terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap upaya peningkatan kebangsaan dan persatuan Indonesia. Adanya sikap-sikap kekerasan, kerusuhan, tawuran merupakan salah satu bentuk akibatnya.

7. Menurut pandangan mereka, telah terjadi penurunan wawasan terhadap Pancasila yang timbul karena kurangnya Pendidikan Pancasila, yang sebenarnya bisa dilakukan tidak hanya melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila tetapi juga dengan kegiatan lain seperti diskusi, seminar, atau penataran.
8. Mata kuliah Pendidikan Pancasila dinilai memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding mata kuliah lain, karena dipandang sebagai dasar pedoman hidup.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. KESIMPULAN**

1. Sebagian besar mahasiswa memandang bahwa pendidikan Pancasila sangat penting untuk diajarkan di Perguruan Tinggi, karena sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
2. Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan mata kuliah